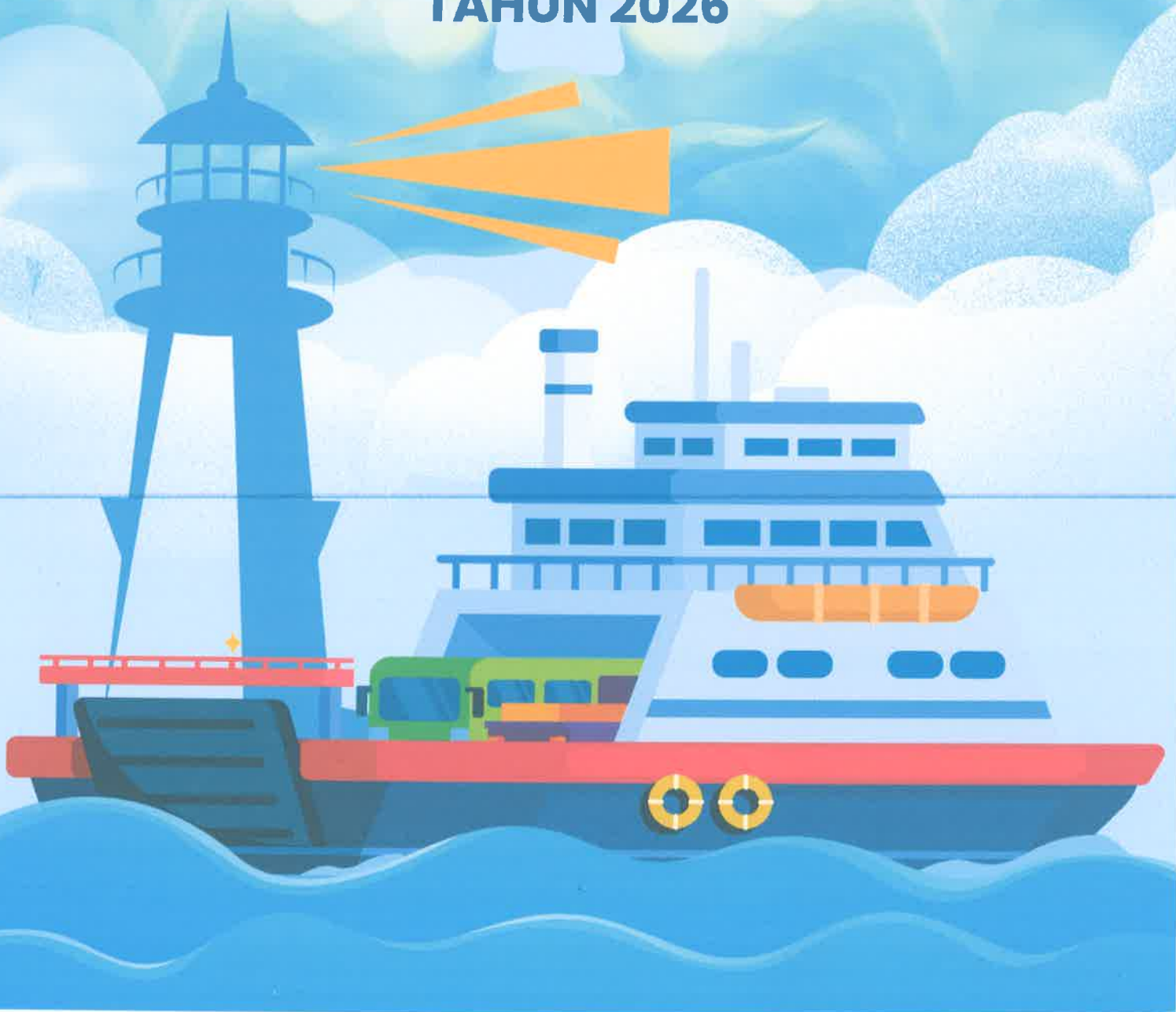




PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KABAG PERENCANAAN	22/12/25	W
2	KABAG HUMAS DAN UMUM	23/12/25	Y/a
3	KABAG SUMBER DAYA MANUSIA	22/12/25	+
4	KABAG BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA	22/12-29	87
5	KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	23/12/25	4
6	KABAG KEUANGAN	22/12/25	11



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MUHAMMAD MASYHUD**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


LOLLAN PANJAITAN
NIP 19710125 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 2.4	Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut	IKK 2.4.1	Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	100
		IKK 2.4.2	Tingkat keandalan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	100
		IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,7
SK 4	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan unit kerja yang baik	IKK 4.1	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%	100
		IKK 4.2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%	100
		IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	100
		IKK 4.4	Persentase penyelenggaraan kegiatan pendukung	%	100
		IKK 4.5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	%	100

		IKK 4.6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	Indeks	94.2
		IKK 4.7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	%	100
		IKK 4.8	Persentase penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	%	100
		IKK 4.10	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	%	100
SK 5.1	Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut	IKK 5.1.1	Persentase terselenggaranya layanan manajemen SDM	%	100
		IKK 5.1.2	Persentase terselenggaranya layanan organisasi dan tata kelola internal	%	100
		IKK 5.1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%	100
		IKK 5.1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKK 5.1.5	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indeks	79.75
SK 5.2	Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut	IKK 5.2.1	Persentase terselenggaranya layanan perencanaan	%	100

		IKK 5.2.2	Persentase terselenggaranya layanan anggaran	%	100
		IKK 5.2.3	Persentase terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi	%	100
		IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	Nilai	80.15
		IKK 5.2.5	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	%	100
		IKK 5.2.6	Persentase terselenggaranya layanan umum	%	100
		IKK 5.2.7	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	%	100
		IKK 5.2.8	Persentase pencapaian kerjasama pemanfaatan (KSP) yang dilaksanakan	%	100
		IKK 5.2.9	Persentase usulan penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	%	100
SK 5.3	Terlaksananya pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi laut	IKK 5.3.1	Persentase terselenggaranya layanan kespbean	%	100
		IKK 5.3.2	Persentase terselenggaranya layanan data dan informasi	%	100
		IKK 5.3.3	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	Nilai	3,9

		IKK 5.3.4	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	%	100
		IKK 5.3.5	Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	3,9
SK 5.4	Terlaksananya pengelolaan legislasi dan litigasi transportasi laut	IKK 5.4.1	Persentase terselenggaranya layanan hukum	%	100
		IKK 5.4.2	Persentase terselenggaranya layanan kerjasama dan kemitraan	%	100
		IKK 5.4.3	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	%	100
		IKK 5.4.4	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	%	100
		IKK 5.4.5	Persentase keterlibatan kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam kerjasama internasional	%	100

Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp.	24.105.068.000,00-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp.	277.389.722.000,00-
3. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp.	19.339.861.000,00-
4. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp.	76.400.109.000,00-
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp.	6.745.065.000,00-

Disetujui,

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 19700622 199803 1 001

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001